

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji diplomasi budaya Indonesia dalam pengusulan Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teori kebijakan luar negeri dan konsep diplomasi budaya sebagai landasan analisis. Untuk membahas upaya diplomasi budaya, penulis menggunakan konsep diplomasi budaya dari Cummings yang mengkategorikan upaya diplomasi budaya menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang bertujuan mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya suatu negara di luar negeri. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa upaya diplomasi budaya Sumbu Filosofis Yogyakarta ke UNESCO mencakup beberapa upaya penting: (1) pengusulan untuk penghormatan dan pengakuan keanekaragaman serta warisan budaya, (2) dialog antar budaya, (3) pemenuhan kriteria nilai universal luar biasa (*Outstanding Universal Value*) dengan perlindungan hak asasi manusia, dan (4) diplomasi dengan pelibatan sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat komponen berhasil meyakinkan UNESCO di dorong oleh proses advokasi dan lobi diplomatik, dialog antar budaya, serta promosi budaya dan HAM Sumbu Filosofis melibatkan semua pemangku kepentingan. Pada tanggal 18 September 2023, Sumbu Filosofis Yogyakarta diumumkan secara resmi sebagai Warisan Dunia. Diplomasi budaya Indonesia terbukti efektif dalam melestarikan warisan budaya dan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan pengakuan UNESCO yang meningkatkan gengsi dan eksistensi Sumbu Filosofis di mata dunia. Penelitian tentang upaya diplomasi budaya untuk memperkenalkan sumbu filosofis Yogyakarta ke UNESCO penting dibahas karena menunjukkan bagaimana diplomasi budaya dapat mengatasi tantangan dan perdebatan, serta mengintegrasikan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan nasional dalam pelestarian warisan budaya.

Kata Kunci : Diplomasi budaya, Sumbu Filosofis Yogyakarta, UNESCO, Warisan Budaya Dunia, OUV, Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

This study examines Indonesia's cultural diplomacy in proposing The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks as a UNESCO World Heritage Site. The research method used is qualitative, with foreign policy theory and the concept of cultural diplomacy as the analytical foundation. To discuss cultural diplomacy efforts, the author uses Cummings' concept of cultural diplomacy, which categorizes efforts into planning, implementation, and evaluation of programs aimed at promoting understanding and appreciation of a country's culture abroad. The study's findings indicate that the cultural diplomacy efforts for Yogyakarta's Philosophical Axis to UNESCO included several key initiatives: (1) proposals for the respect and recognition of cultural diversity and heritage, (2) intercultural dialogue, (3) meeting the criteria of Outstanding Universal Value with human rights protection, and (4) diplomacy involving the public sector. The research results show that these four components successfully convinced UNESCO, driven by advocacy and diplomatic lobbying, intercultural dialogue, and the promotion of culture and human rights. This process involved all stakeholders. On September 18, 2023, The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks was officially announced as a World Heritage Site. Indonesia's cultural diplomacy has proven effective in preserving cultural heritage and promoting sustainable development, with UNESCO recognition enhancing the prestige and existence of the Philosophical Axis globally. The study on cultural diplomacy efforts to introduce , The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks to UNESCO is important because it demonstrates how cultural diplomacy can address challenges and debates, and integrate various interests to achieve national goals in cultural heritage preservation.

Key words: Cultural diplomacy, The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks, UNESCO, World Heritage, OUV, Foreign Policy.